

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK

HUNI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN

HULU SUNGAI UTARA

(Studi Kasus Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Pengajuan Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

IMAS

NPM : 20.22.018

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

NAMA : Imas
NPM : 2022018
PROGRAM STUDI : S1 Administrasi Publik
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KECAMATAN
AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat
dan Desa Harusan Telaga)

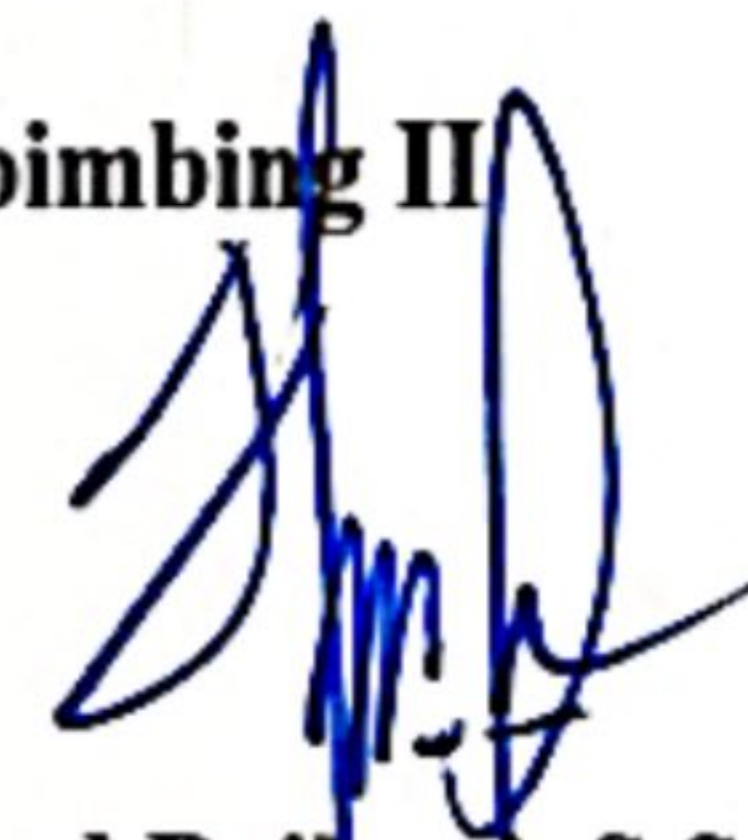
Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui Proposal Skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan kepembimbing Skripsi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

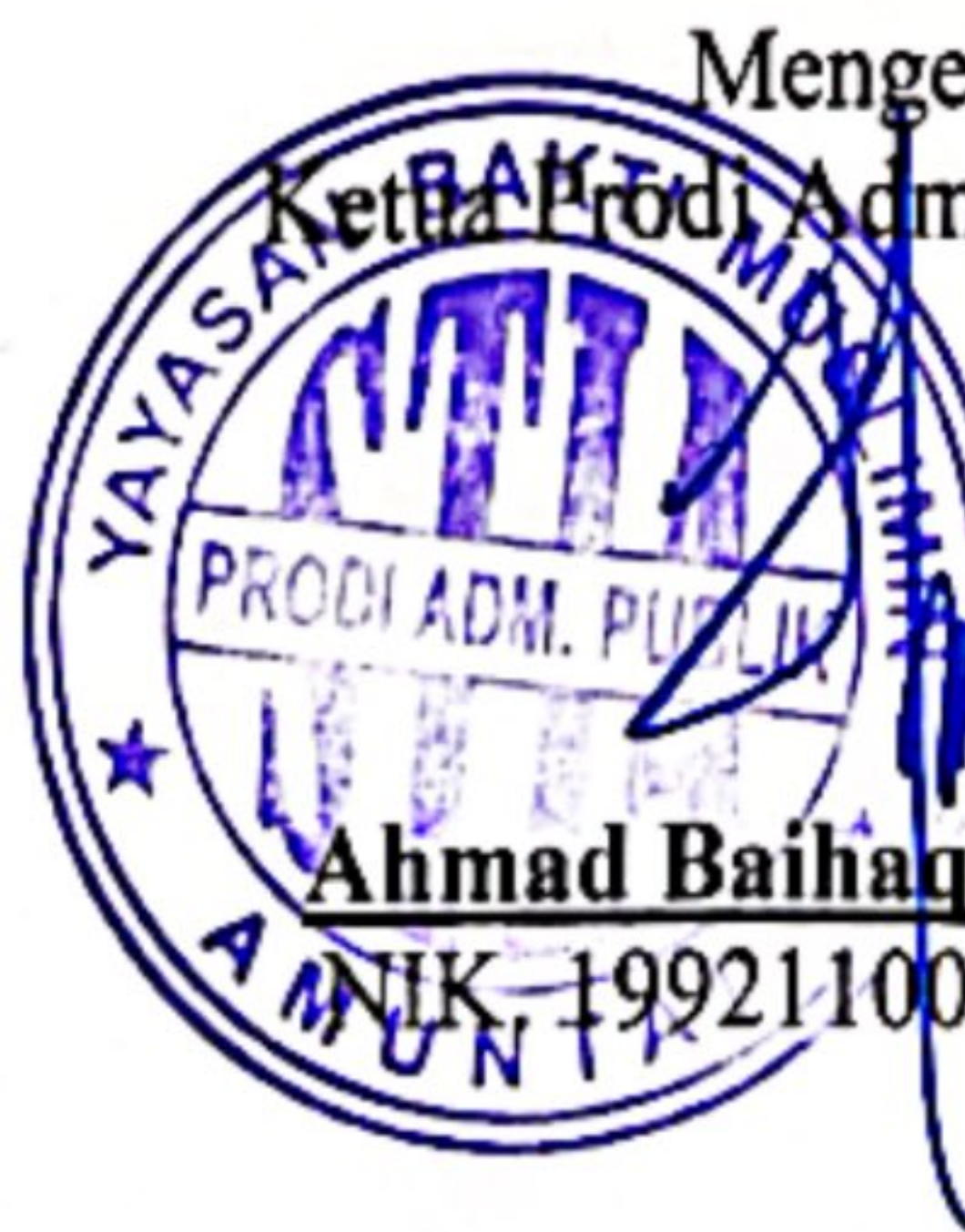
Amuntai, 04 April 2026

Pembimbing I


Arif Budiman, S.Sos., M.AP.
NUPTK. 7950765666130302

Pembimbing II


Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NUPTK.. 2436770671130263

Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NUPTK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur peneliti atas kehadiran Allah SWT, Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT. sehingga peneliti bisa menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Implementasi Program penanganan rumah tidak layak huni di kecamatan Amuntai selatan kabupaten hulu sungai utara (studi kasus desa simpang empat dan Harusan telaga)“ Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang peneliti dapatkan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M. AP., CIQnR., CIQaR., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos. M.A. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Arif Budiman, S.Sos, M.A.P. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
4. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos. M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
5. Kepada ibu saya tercinta, sosok perempuan luar biasa yang tidak hanya berperan sebagai seorang ibu, tetapi juga dengan penuh keteguhan jiwa dan

keikhlasan hati telah menjadi sosok ayah, memikul beban kehidupan tanpa pernah mengeluh, kesabaran yang tiada batas, ketegaran yang tak tergoyahkan, serta limpahan kasih sayang yang begitu tulus dan tak terhingga senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan penulis, setiap perjuangan panjang tersimpan luka, air mata, serta doa-doa yang tak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujudnya, demi membesarkan, menjaga, mendidik, dan menguatkan penulis agar mampu berdiri tegak di tengah kerasnya kehidupan, untuk bisa meraih harapan, serta menjadi pribadi yang lebih baik.

6. Dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan proposal skripsi ini hingga selesai.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal yang baik dan mendapat ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangatlah peneliti harapkan. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teoritis	12
C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Tipe Penelitian	33
D. Data dan Sumber Data.....	34
E. Desain Operasional Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36

G. Teknik Analisis Data	38
H. Uji Kredibilitas Data.....	39

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian	35
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Salah satu indikator utama tercapainya kesejahteraan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yang mencakup pangan, sandang, dan papan (perumahan). Rumah bukan sekadar tempat berlindung dari ancaman alam dan lingkungan, melainkan juga berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian nilai budaya, serta fondasi awal dalam peningkatan kualitas hidup generasi mendatang. Terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak merupakan prasyarat mutlak bagi masyarakat untuk dapat menjaga kesehatan, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Namun demikian, dalam realitas kehidupan bermasyarakat, pemenuhan kebutuhan atas perumahan yang layak huni belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan penduduk. Kesenjangan ekonomi dan persoalan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan, mengakibatkan sebagian masyarakat terpaksa menempati hunian yang berada di bawah standar kelayakan. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga saat ini masih menjadi isu yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah di berbagai tingkatan. RTLH umumnya ditandai dengan kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan konstruksi, minimnya ventilasi dan pencahayaan, serta buruknya fasilitas sanitasi lingkungan. Kondisi ini apabila

dibiarkan tidak hanya berdampak negatif pada tingkat kesehatan penghuninya, tetapi juga berpotensi mengunci keluarga tersebut dalam siklus kemiskinan yang berkepanjangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, pemerintah melakukan berbagai intervensi kebijakan untuk menangani masalah RTLH, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Secara normatif, pelaksanaan program ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang diperkuat dengan berbagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Regulasi ini menggarisbawahi bahwa program penanganan RTLH bukan sekadar penyaluran bantuan fisik, melainkan sebuah proses pemberdayaan yang menuntut tertib administrasi. Aturan tersebut mensyaratkan adanya alur yang jelas, mulai dari tahap sosialisasi yang komprehensif, proses verifikasi kelengkapan administrasi yang berjenjang, pendampingan teknis oleh fasilitator, serta koordinasi lintas sektoral antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga perangkat desa.

Meskipun instrumen kebijakan telah dirumuskan di tingkat pusat, keberhasilan implementasinya di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya pelaksana dan dinamika penambahan data usulan masyarakat. Hal ini tergambar pada kondisi penanganan RTLH di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dihadapkan pada peningkatan jumlah usulan perbaikan rumah secara berkelanjutan. Berdasarkan data rekapitulasi usulan tingkat kabupaten, tercatat bahwa pada tahun 2023 jumlah RTLH yang

terdata adalah sebanyak 40 unit. Jumlah tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 152 unit, dan diproyeksikan kembali bertambah menjadi 218 unit pada rencana penanganan tahun 2025.

Mengerucut pada lingkup wilayah pelaksanaan yang lebih spesifik, beban penanganan RTLH tersebut sangat terlihat di Kecamatan Amuntai Selatan. Merujuk pada data rekapitulasi per kecamatan, pada tahun 2023 Kecamatan Amuntai Selatan belum mencatatkan adanya data usulan penanganan atau sebanyak 0 unit. Namun, pada tahun 2024 mulai masuk pendataan sebanyak 16 unit, dan angka ini terus meningkat pada rencana tahun 2025 menjadi 38 unit rumah. Lebih dalam lagi di tingkat sasaran akhir, yaitu di Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga, usulan RTLH mulai tercatat secara spesifik pada rencana penanganan tahun 2025. Di mana Desa Simpang Empat mencatatkan usulan sebanyak 5 unit, sementara Desa Harusan Telaga mencatatkan sebanyak 4 unit.

Hadirnya peningkatan data usulan baru di tingkat desa yang sebelumnya belum memiliki riwayat penanganan ini memunculkan tantangan administratif di lapangan. Di satu sisi, Permen PUPR dan petunjuk teknis mensyaratkan proses sosialisasi yang masif dan validasi dokumen administrasi yang ketat. Di sisi lain, peningkatan kuantitas usulan yang cukup cepat menuntut kesiapan alokasi anggaran daerah yang memadai serta kelancaran koordinasi antar jenjang pemerintahan. Kondisi inilah yang menciptakan kesenjangan antara ketentuan regulasi kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan, baik dari segi pembiayaan, sinergi petugas

birokrasi, maupun kesiapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administratif.

Persoalan administratif tersebut dibuktikan dengan tingginya beban data rumah tidak layak huni yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Meskipun program penanganan terus dijalankan, volume usulan baru dari masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan akan hunian layak masih sangat besar di tingkat bawah. Untuk melihat sejauh mana perkembangan dan jumlah sebaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka data rekapitulasi tahun 2023 hingga 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni

No	Kecamatan	2023 (RTLH)	2024 (Peningkatan RTLH)	2024 (RTLH)	2025 (Peningkatan RTLH)	2025 (RTLH)
1	Paminggir	148	0	148	0	148
2	Danau Panggang	258	0	258	26	232
3	Amuntai Tengah	799	45	754	23	731
4	Amuntai Selatan	597	16	581	38	543
5	Amuntai Utara	372	21	351	8	343
6	Haur Gading	384	15	369	21	348
7	Sungai Pandan	774	10	764	55	709
8	Sungai Tabukan	338	15	323	8	315
9	Banjang	393	25	368	32	336
10	Babirik	350	10	340	7	333
-	Jumlah	4413	157	4256	218	4038

Berdasarkan paparan kesenjangan antara regulasi kebijakan, data rekapitulasi usulan, dan kondisi objektif di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Simpang Empat dan Desa

Harusan Telaga, maka dapat ditarik beberapa fenomena masalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di desa Simpang Empat Kecamatan Amuntai Selatan dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) kepala keluarga ditangani ditahun 2025 sebanyak 5 (lima buah rumah) dan desa Harusan Telaga Kecamatan Amuntai Selatan dengan Jumlah 13 (tiga belas) kepala keluarga ditangani ditahun 2025 sebanyak 4 (empat buah rumah) yang belum mampu tertangani secara baik akibat keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia. Akibatnya dari keterbatasan anggaran pendanaan ini mengharuskan proses penanganan direalisasikan secara bertahap, sehingga tidak seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi kriteria kelayakan administratif dapat segera diakomodasi untuk menerima bantuan pada periode yang sama. *(Sumber : Observasi Peneliti)*
2. Kerja sama kelembagaan yang belum berjalan secara optimal antara petugas tingkat kecamatan dan jajaran aparatur desa, khususnya pada tahapan penting yang meliputi proses penghimpunan data lapangan terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta kelancaran koordinasi dalam pembuatan dokumen proposal pengajuan bantuan. *(Sumber : Observasi Peneliti)*
3. Pelaksanaan sosialisasi kepada jajaran aparatur pemerintah desa mengenai program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum berjalan secara optimal dan terstruktur, sehingga pada tataran implementasi di lapangan masih terdapat pihak yang kurang memahami tahapan

mekanisme pelaksanaan, standar kriteria penerima manfaat, serta pemenuhan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. (*Sumber : Observasi Peneliti*)

4. Proses validasi usulan yang memakan waktu cukup panjang melalui serangkaian tahapan birokrasi ini terjadi akibat masih adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memahami rincian kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada inefisiensi waktu, di mana berbagai dokumen pengajuan terpaksa harus dikembalikan untuk diperbaiki atau dilengkapi kembali oleh pihak pemohon. (*Sumber : Observasi Peneliti*)

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana regulasi tersebut telah diterapkan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta dampaknya terhadap dinas maupun masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok-pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Penerapan Fokus yang jelas dapat membantu peneliti membuat keputusan yang tepat dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu

Sungai Utara (studi kasus Desa simpang empat dan desa Harusan telaga). Untuk memperjelas dan mempertajam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40), menyebut implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Harusan Telaga) ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Harusan Telaga) ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Harusan Telaga)
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Amuntai

Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat
Dan Harusan Telaga)

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori, terutama dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya tentang Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan penanganan rumah tidak layak huni
- b. Bagi pemerintah, Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perumahan Kawasan Dan Pemukiman Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan Amuntai Selatan Dan Pemerintah Desa Khususnya Desa Simpang Empat Dan Harusan Telaga mengenai penerapan program penanganan rumah tidak layak huni dalam mengurangi RTLH dan menyejahterakan masyarakat. Serta sumbangan peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Khairun Nisa, NPM 18.20.06667 (2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu)”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh waktu pencairan dan pelaksanaan tidak memiliki kepastian waktu yang jelas, kerja sama yang minim dari pihak terkait (Kasi Kessos dan Pemerintah Desa), Sosialisasi kepada masyarakat tentang RS-RTLH yang belum berjalan secara optimal, tidak ada kepastian jumlah penerima RS-RTLH tiap tahunnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu) dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah Dan desa Galagah Hulu).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data yang dipilih dengan teknik total Sampling dengan jumlah informan 15 (lima belas) orang. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah data terkumpul dilakukan analisis data melalui kondensasi data, display data dan kesimpulan dan verifikasi. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check..

Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu) kurang baik, hal itu terlihat dari beberapa indikator yang belum sesuai dengan tujuan program RS-RTLH yaitu pengetahuan masyarakat tentang program ini kurang sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat yang sangat minim terutama pada saat pelaksanaan program RS-RTLH berlangsung dan jumlah proporsi sasaran yang masih rendah yang menyebabkan lambatnya sebuah program terimplementasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan kelengkapan administrasi, faktor penghambat yaitu lokasi dan kenaikan harga bahan bangunan.

Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial provinsi maupun Kepala Dinas Sosial kabupaten agar dapat melaksanakan program RS-RTLH dan meningkatkan jumlah penerima RS-RTLH setiap tahunnya serta

memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Kepada Pemerintah Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu dapat memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai RS-RTLH kepada masyarakatnya, kepada masyarakat pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

2. Feriyansah Adi Saputra, Rahma Cantika Dewi, Aryo Hendrawan, Dewi Ratu Hapsari Jati, Firman Budhi Darmansyah (2024) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kasemen Kota Serang”. Kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara memadai. Salah satu konsekuensi dari kondisi kemiskinan adalah rumah yang tidak layak huni. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Serang menginisiasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang berguna untuk memberikan bantuan kepada warga. penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program RS-RTLH di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) telah berkomitmen untuk bekerja sama, terdapat kekurangan dalam komunikasi terkait penyaluran dana program. Namun demikian, implementasi program ini di Kota Serang cukup berhasil, dengan rehabilitasi sebanyak 1.241

rumah antara tahun 2021 hingga 2023. Berdasarkan analisis tersebut, disarankan agar Dinsos dan DPRKP mempercepat proses pengajuan bantuan, meningkatkan komunikasi antar dinas, dan melibatkan masyarakat dalam pembelian bahan bangunan. Selain itu, penting untuk mendorong warga yang tinggal di rumah tidak layak huni untuk memanfaatkan fasilitas rumah susun yang disediakan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan melakukan evaluasi yang cermat terhadap implementasi program RS-RTLH, diharapkan Pemerintah Kota Serang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Secara etimologi, kata kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti negara kota, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris lama (*Middle English*) istilah ini menjadi "*policie*" yang berarti berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah. Kebijakan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, dan sering kali berkaitan dengan masalah-masalah publik.

Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye dalam (Delly Maulana, 2019: 2), adalah “*whatever government choose to do or not to do*”.

Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah, baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan publik”.

Inu Kencana dalam (Abdal, 2025:32) Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik

Menurut Woll dalam (Aras Solong dan Asri Yadi, 2021:57) Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Irfan Islami dalam (Aras Solong dan Asri Yadi, 2021:57-58) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Adapun menurut S. Marwiyah dalam (Heru Wahyudi (2025:78) Kebijakan publik memiliki ciri khas yang membedakannya dari keputusan lainnya, yakni disusun oleh lembaga atau aktor pemerintah yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan persoalan publik dan mengakomodasi kepentingan bersama. Dampaknya bersifat luas, menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang terus berkembang.

b. Tujuan Kebijakan Publik

Riant Nugroho dalam (Syarkawi dkk, 2025:4-5)

menyebutkan 4 (empat) tujuan untuk kebijakan publik, yaitu:

- 1) Untuk mendistribusikan sumber daya secara nasional, yang mencakup redistribusi dan absortif sumber daya secara nasional. Redistribusi kebijakan yang mengarah pada pembagian terhadap sumber daya manusia yang ada sebagai sumber utama dalam kebijakan absortif. Kebijakan absortif adalah kebijakan yang mengarah pada kebijakan penyerapan. Penyerapan terhadap pendapatan pemerintah untuk kemudian dilakukan redistribusi sebagai penyanggah dari kebijakan-kebijakan yang ada, karena kebijakan absortif bertujuan untuk mendukung kebijakan redistribusi.
- 2) Untuk regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan) dan deregulasi (kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan atau peraturan). Kebijakan publik akan menghasilkan sebuah regulasi yang dibangun berdasarkan kesepakatan untuk dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan.
- 3) Untuk melakukan stabilitas terhadap situasi dan kondisi suatu negara. Kondisi yang stabil adalah harapan dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Stabilitas secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya adalah bagian dari kebijakan publik.
- 4) Untuk memperkuat pasar dan Negara, karena ekonomi negara tergantung dari pasar. Pasar yang menentukan naik turunnya harga. Pasar pula yang memainkan peran perekonomian secara global. Memperkuat pasar untuk melakukan stabilitas ekonomi adalah penting untuk dilakukan dan dikontrol. Di samping itu, memperkuat negara adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam rangka untuk mengamankan dari serangan yang merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Keduanya saling dikuatkan agar menjadi negara yang mandiri, sejahtera dan sentosa.

c. Proses Kebijakan Publik

Menurut William Dunn dalam (Abdal, 2025:80-81)

menyebutkan, dalam pembuatan kebijakan publik, tahap-tahap yang dilaluinya adalah:

- 1) Tahap penyusunan agenda, masalah-masalah akan berkompetisi dahulu sebelum dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada saat itu, suatu masalah

mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap yang akan menentukan apakah suatu masalah akan dibahas menjadi kebijakan atau sebaliknya.

- 2) Tahap formulasi kebijakan, masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan ini, masing-masing alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- 3) Tahap implementasi kebijakan, suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika tidak diimplementasikan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- 4) Tahap penilaian kebijakan, pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, maka ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2. Implementasi Program

Menurut Van Mater dan Van Horn dalam buku Mirdhani et al. (2025:12) bahwa implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, atau kelompok-kelompok yang mengarahkan pada tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Umar dalam buku Mirdhani et al. (2025:12) Implementasi adalah satu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah

disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Kemudian menurut Nuravivah dalam buku Mirdhani et al. (2025:12), implementasi diartikan sebagai sesuatu hal yang dihasilkan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengalami keberhasilan atau kegagalan

Arikunto dalam buku Sulistyorini et al (2021), mengatakan bahwa sebagaimana dalam kamus, pengertian program adalah sebagai berikut: (a) Program diartikan dengan rencana, (b) Program juga disebut sebagai kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sengaja untuk mengetahui tingkat keberhasilan program.

Program menurut Wirawan dalam buku Sulistyorini et al (2021) adalah kegiatan/aktivitas yang terancang guna melaksanakan suatu kebijakan dan waktu pelaksanaannya tidak terbatas. Dapat dikatakan bahwa program merupakan rancangan kegiatan yang telah terkonsep tertulis maupun tidak tertulis, guna melaksanakan sebuah kegiatan

3. Teori Implementasi

a. Georgeo C Edward III

Berdasarkan Teori Georgeo Edwards III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:

Pertama adalah komunikasi kebijakan. Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara

lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Sementara itu, dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan. Terakhir, dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kedua adalah sumber daya. Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), serta informasi dan kewenangan (*information and authority*).

Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sementara itu, dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Selanjutnya, dimensi informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi. Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan. Orang-orang yang dipilih harus memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya.

Keempat yaitu struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP di antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi *fragmentation* merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana, koordinasi yang dibutuhkan semakin intensif.

b. Van Meter dan Van Horn

Van Metter dan Van Horn dalam buku Reno Affrian (2023:38-40) merumuskan enam variabel yang memengaruhi kinerja kebijakan publik.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengukuran kinerja implementasi kebijakan bisa dilakukan menggunakan tingkat keberhasilan dengan syarat bahwa ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran atau tujuan kebijakan tidak realistis untuk diterapkan di tingkat warga, pelaksanaan kebijakan akan sulit mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan.

2) Sumber Daya

Keahlian untuk menggunakan sumber daya yang ada juga memainkan peran yang penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, manusia adalah sumber daya yang paling penting untuk menentukan keberhasilan implementasinya. Beberapa tahapan dalam proses implementasi menekankan tersedianya SDM yang kualitasnya sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan suatu kebijakan dan sudah ditetapkan secara politik. Dengan demikian, kehilangan kompetensi dan kapabilitas sumber daya bisa berdampak pada kinerja kebijakan publik.

Sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga di luar sumber daya manusia adalah sumber daya finansial dan waktu. Meski sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, akan ada permasalahan pelik untuk mewujudkan target yang ingin dicapai oleh kebijakan publik jika kurangnya dana melalui anggaran tidak tersedia. Demikian pula dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kurangnya dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terbatas, hal ini bisa jadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Untuk itu, sumber daya yang dikehendaki oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga sumber daya tersebut: manusia, finansial, dan waktu.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Perhatian utama difokuskan pada agen pelaksana, baik dalam bentuk organisasi formal maupun informal, yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini memiliki signifikansi penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dan cocok dengan para agen pelaksana tersebut. Sebagai contoh, jika implementasi kebijakan publik bertujuan mengubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, agen pelaksana yang

ditugaskan harus memiliki karakter yang tegas dan taat pada aturan serta sanksi hukum. Namun, jika kebijakan publik itu tidak memberikan pengaruh yang besar dalam mengubah perilaku dasar manusia, agen pelaksana bisa saja diturunkan sehingga tidak sekeras dan setegas contoh yang sebelumnya.

Di samping itu, cakupan wilayah implementasi kebijakan pun harus dipertimbangkan untuk memutuskan siapa agen pelaksananya. Apabila cakupan implementasi kebijakan semakin luas, agen yang terlibat juga akan semakin besar.

4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap menerima atau menolak dari pelaksana memiliki pengaruh yang sangat banyak akan keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi, sebab kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Namun, kebijakan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui atau bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang masyarakat ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi dalang dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus juga memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

c. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model ketiga dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis

A. Gunn dalam buku Reno Affrian (2023:38-40), Model ini menegaskan beberapa syarat berikut ini yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi kebijakan.

- 1) Berkaitan dengan jaminan bahwa lembaga/badan pelaksana tidak akan mengalami masalah yang besar akibat kondisi eksternal yang dihadapi.
- 2) Apakah tersedia cukup waktu dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya?
- 3) Apakah perpaduan sumber daya yang dibutuhkan benar-benar tersedia?
- 4) Apakah kebijakan yang akan dilaksanakan didasarkan pada hubungan kausal yang andal?
- 5) Seberapa banyak apakah hubungan sebab-akibat yang terjadi dengan asumsi bahwa semakin sedikit hubungan tersebut, semakin tinggi juga hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut dapat dicapai.
- 6) Apakah ada hubungan ketergantungan kecil antara pihak-pihak yang terlibat?
- 7) Memiliki pemahaman yang mendalam dan kesepakatan tentang tujuan yang ingin dicapai.
- 8) Tiap-tiap tugas sudah diuraikan secara rinci dan diletakkan dalam urutan yang benar.
- 9) Memiliki komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Tiap-tiap pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan bisa menuntut dan memperoleh kepatuhan yang sempurna.

d. Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi kebijakan publik lainnya ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam buku Reno Affrian (2023:38-40). Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yang akan dijelaskan di bawah ini.

- 1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap
 - a) Kesukaran-kesukaran teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukuran prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang memengaruhi masalah. Di samping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknis-teknis tertentu.
 - b) Keberagaman perilaku yang diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pula pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian, semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administrator atau birokrat) di lapangan.

- c) Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Semakin kecil dan jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka besar peluang untuk memobilisasi dukungan politik terhadap kebijakan. Dengan demikian, peluang untuk tercapainya tujuan kebijakan akan lebih terbuka.

- d) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya, ada sejumlah masalah yang lebih dapat dikendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidak terlalu besar.

- 2) Kemampuan Kebijakan menstruktur Proses implementasi Secara Tepat

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menyusun proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara, yaitu:

- a) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau ukuran kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

- b) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

- c) Ketetapan alokasi sumber dana

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

- d) Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara lembaga atau instansi pelaksana

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik adalah kemampuannya untuk memadukan hierarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan

lembaga lupa dilaksanakan, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

- e) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto dan intensif yang memadai untuk kepatuhan kelompok sasaran. Suatu undang-undang harus dapat memengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

- f) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan termaktub dalam undang-undang

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi terciptanya tujuan. Hal ini sangat signifikan karena *top down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk diimplementasikan kepada para pejabat pelaksana di level lokal.

- g) Akses formal pihak-pihak luar

Faktor lain yang juga dapat memengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Hal ini dimaksudkan agar kontrol pada pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- 3) Variabel-variabel di luar undang-undang yang memengaruhi implementasi

- a) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan di antara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu, faktor eksternal juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan kebijakan publik.

- b) Dukungan publik

Hakikat perhatian publik bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dibutuhkan adanya sentuhan dukungan warga. Untuk itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

- c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di Tingkat

masyarakat, warga bersikap kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat memengaruhi keberhasilan atau gagalnya implementasi kebijakan publik. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh masyarakat.

- d) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya dalam badan-badan pelaksana melalui penanganan institusi dan pejabat teratas. Selain itu, kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

e. Model Elmore, Lipsky, Hjem & O'Porter

Secara prinsip, model implementasi ini didasarkan pada serangkaian tahapan yang mencakup tahapan: (Affrian, 2023)

- 1) melakukan pengidentifikasian pada jaringan aktor yang ikut terlibat;
- 2) menentukan jenis kebijakan publik yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan atau bisa juga dengan melibatkan pejabat pemerintah di tingkat terbawah;
- 3) merancang kebijakan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat yang menjadi target; dan
- 4) mendorong prakarsa masyarakat, baik itu dilakukan secara langsung atau bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

f. Model Gordon Chase

Gorden Chase dalam buku Reno Affrian (2023:38-40)

memperinci ke dalam 15 bidang atau sumber sebagai berikut:

- 1) Kesulitan akibat tuntutan operasional (*Difficulties arising from operational demands*)
 - a) Orang yang akan dilayani (*People to be served*)
 - b) Sifat ilmu (*Nature of science*)
 - c) Kemungkinan biaya distorkan atau penyimpangan (*Likelihood of costlines of cistorkons of irregularities*)
 - d) Pengendalian program (*Controllability of program*)

- 2) Kesulitan yang timbul dari sifat dan ketersediaan sumber daya (*Difficulties arising from nature and availability of resources*)
 - a) Uang (*Money*)
 - b) Personil (*Personnel*)
 - c) Ruang (*Space*)
 - d) Perlengkapan dan peralatan teknis (*Supplies and technical equipment*)
- 3) Kesulitan yang timbul karena kebutuhan untuk membagi wewenang (*Difficulties arising from need to share authority*)
 - a) Agen atas (*Overhead Agencies*)
 - b) Instansi lainnya (*Other line agencies*)
 - c) Politisi terpilih (*Elected politicians*)
 - d) Tingkat pemerintah yang lebih tinggi (*Higher level of government*)
 - e) Penyedia sektor swasta (*Private sector providere*)
 - f) Khusus kelompok kepentingan (*Special interest groups*)
 - g) Pers (*The Press*)

Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Ide dasar dari model ini adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat penerapan dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup: a. kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan; b. jenis manfaat yang akan dihasilkan; c. derajat perubahan yang diinginkan; d. kedudukan pembuat kebijakan; e. (siapa) pelaksana kebijakan program; f. sumber daya yang dikerahkan

4. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Disperakim untuk mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni dalam (Amir Salipu dkk, 2023:33) Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak

memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

a. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Dalam buku Amir Salipu, dkk (2023:34) kriteria untuk rumah tidak layak huni sebagai berikut:

- 1) Konstruksi bangunan membahayakan
- 2) Standar luasan ruang < 9 m² per orang
- 3) Pencahayaan alami kurang (remang-remang atau gelap pada siang hari)
- 4) Penghawaan tidak baik (ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi)
- 5) Kelembapan ruang tinggi (akibat ventilasi dan pencahayaan)
- 6) Terletak di daerah membahayakan
- 7) Air bersih belum/tidak memenuhi standar
- 8) Sanitasi buruk

b. Dampak Rumah Tidak Layak Huni

1) Dampak Rumah Tidak Layak Huni Bagi Penghuni

a) Sosial

Rumah tidak layak huni mempunyai dampak langsung dan tidak langsung secara fisik atau non fisik kepada penghuni. Dampak terhadap fisik penghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena kurang mampu memberi perlindungan dari panas dan hujan serta bahaya konstruksi, adalah masalah kesehatan dan ancaman bencana, dan dampak terhadap non fisik adalah kecemasan yang berkepanjangan. Dampak secara fisik rumah tidak layak huni karena kecukupan luas ruang (sempit) adalah khususnya pertumbuhan bagi anak-anak dan keleluasaan bergerak bagi orang dewasa dan dampak secara non fisik

membuat penghuni tidak betah tinggal di dalam rumah (anak remaja keluyuran atau banyak di jalanan).

Dampak fisik rumah tidak layak huni karena kurang pencahayaan dan penghawaan adalah pada kesehatan, mudah sakit, mudah lelah dan tidak produktif dan dampak non fisik membuat penghuninya kurang/tidak betah tinggal di dalam rumah. Dampak Rumah tidak layak huni terhadap penghuni karena sistem limbah yang tidak baik atau tidak ada dan ketersediaan air bersih yang cukup adalah kesehatan penghuni.

b) Ekonomi

Karena kurang produktif maka penghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pendapatannya relatif kecil baik sebagai penyedia jasa atau sebagai wiraswasta, dampak ikutannya. mereka terjebak dalam lingkaran "setan" kemiskinan yang menerus.

2) Dampak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pada Lingkungan

Secara fisik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) membuat tampilan perumahan menjadi kurang asri apalagi dalam jumlah banyak karena pada umumnya kepadatannya tinggi. Karena pada umumnya lingkungan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak tertata maka sistem jaringan jalan, sanitasi lingkungan, drainase menjadi tidak efektif sehingga dampaknya secara:

- a) Sosial; kehidupan sehari-hari MBR Penghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga khususnya di perkotaan penghuni jarang bersosialisasi akibatnya budaya kebersamaan atau gotong royong semakin terkikis, segala sesuatu di ukur dengan jasa atau imbalan.
- b) Ekonomi; sebagai dampak dari berkurangnya kebersamaan maka kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan ekonomi yang harus dilakukan berkelompok sulit bahkan tidak dilakukan.
- c. Standar Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi empat indikator meliputi ketahanan/keselamatan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Ketahanan bangunan

Persyaratan ketahanan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen nonstruktur bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, sloof atau balok bawah, kolom atau tiang, ring balok atau balok atas, dan rangka atap. Kualitas komponen struktur bangunan meliputi dimensi, campuran atau bahan bangunan, dan ikatan antar komponen struktur. Komponen nonstruktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan

penutup atap. Bahan bangunan memenuhi syarat ketahanan, kekuatan, keawetan, kesehatan, tidak mengandung bahan berbahaya beracun, dan menggunakan produk dalam negeri yang berpedoman pada kaidah penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

2) Kecukupan luas

Tempat tinggal Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per-orang dihitung 7,2 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya. Pemenuhan kecukupan ruang karena keterbatasan lahan, dapat dilakukan secara vertikal sepanjang anggaran mencukupi. Dalam hal terdapat keterbatasan kemampuan berswadaya, maka ukuran rumah dapat diperkecil dengan konsep rumah tumbuh dan memperhatikan pemenuhan standar teknis yang lebih utama yaitu ketahanan bangunan.

3) Akses sanitasi layak

Sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta septictank yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Sanitasi dapat berada di dalam rumah, halaman rumah, atau komunal dengan jarak yang terjangkau dan dapat melayani seluruh anggota keluarga.

4) Akses air minum layak

Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang memenuhi standar air untuk dikonsumsi dan mudah dijangkau dari sisi waktu atau jarak tempuh.

Selain memenuhi 4 indikator tersebut, rumah layak huni juga memenuhi syarat kesehatan yang terdiri atas pencahayaan dan penghawaan. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari. Tipologi rumah meliputi rumah tembok, setengah tembok, rumah kayu tapak, rumah kayu panggung, dan tipologi lain sesuai kearifan lokal dengan tetap memperhatikan standar teknis rumah layak huni.

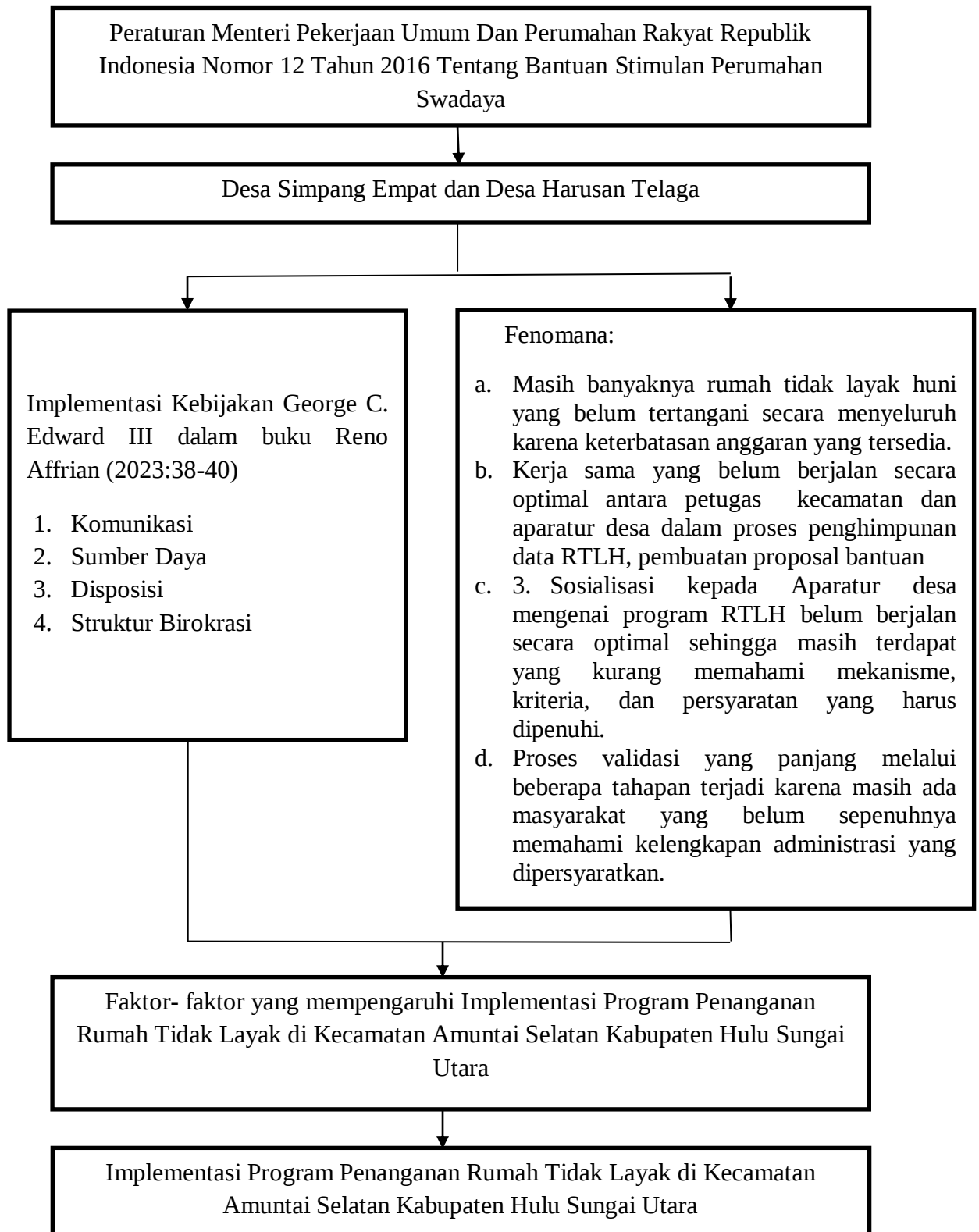
C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian dari suatu alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan acuan dalam memecahkan suatu permasalahan yang diteliti secara logis, dan sistematis yang dibuat dengan kedudukan atau tingkat yang dilandaskan dengan teori-teori yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40). Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Dibuat Oleh Peneliti, 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini yaitu Desa Simpang Empat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berlokasi di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan, Kalimantan Selatan, dengan kode pos 71452. Serta Desa Harusan Telaga terletak di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.

Menurut Landy dan Conte dalam (Seta A Wicaksana, Aisyah Pia Asrun Putri & Andita Putri Ramadhania, 2021:19) Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang didasarkan pada observasi, wawancara, studi kasus, dan analisis buku harian atau dokumen tertulis sehingga data yang dihasilkan berupa deskripsi naratif tentang peristiwa atau proses.

Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data atau informasi untuk mengungkapkan proses terjadi di lapangan yang bersifat alamiah yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Secara konkret penelitian ini akan mendeskripsikan gambaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Desa Simpang Empat dan Desa Harusan Telaga.

Tipe penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono dalam (Muhammad Buchori Ibrahim dkk, 2023:87) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat post positivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Adapun menurut Sukmadinata dalam (Muhammad Buchori Ibrahim dkk, 2023:87) Tipe Penelitian Deskriptif Kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dengan kata lain data primer merupakan data langsung yang dikumpulkan dan diperoleh dari informan.

Menurut Muhaimin dalam (Qadriani Arifuddin dkk, 2025:39) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui responden dan informan. Sumber data primer ini mencakup informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait seperti responden, informan, dan narasumber lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sumber datanya diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang didapat melalui buku-buku, data dan dokumen yang berhubungan dengan implementasi program penanganan rumah tidak layak huni.

Menurut Sugiyono dalam (Ahmad dkk, 2024:65) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

c. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Sumber data pada penelitian ini sesuai dengan teknik pemakaian sumber data yaitu *Purposive Sampling*.

Menurut Sugiyono dalam (Dani Nur Saputra dkk, 2022:38) “*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Data Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Disperkim	1
2	Kepala Bidang	1
3	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	1
4	Kepala Desa Simpang Empat	1
5	Kepala Desa Harusan Telaga	1
6	Ketua RT Desa Simpang Empat	1
7	Ketua RT Desa Harusan Telaga	1
8	Penerima Bantuan Simpang Empat	3
9	Penerima Bantuan Harusan Telaga	3
10	Masyarakat Biasa	2
Total		15

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti, 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Desain Operasional adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data.

Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40).

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub-Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40)	a. Komunikasi	a. Sosialisasi b. Koordinasi c. Kejelasan Informasi
	b. Sumber Daya	a. Akurasi Data b. Anggaran c. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
	c. Disposisi	a. Komitmen b. Responsivitas c. Objektivitas (Prioritas Penanganan)
	d. Struktur birokrasi	a. Pembagian Tugas b. Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Fragmentasi Kelembagaan

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti, 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu suatu langkah yang sangat penting karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam

rangka analisis penelitian. Untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan masalah yang diteliti di lapangan pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat, mencatat, serta memahami kondisi nyata yang terjadi, baik terkait perilaku individu, interaksi sosial, maupun situasi lingkungan yang menjadi fokus penelitian.

Adapun Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2021:203) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dan berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam buku sugiyono (2021:497), Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Susan Stainback dalam buku sugiyono (2021:498), mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2021:509).

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya. Dokumen yang digunakan dapat berupa laporan penelitian sebelumnya, data statistik, catatan kegiatan, arsip pemerintah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan (Bahruddin, Halim & Gazaly, 2024:21).

G. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman dalam buku Sugiyono (2022:369-375), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisisnya:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dapat diwujudkan dalam tema.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data adalah proses pengajian data untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan mewakili pengalaman nyata dari partisipan. Uji ini dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali kepada partisipan, misalnya melalui pembacaan ulang transkrip wawancara, guna memastikan bahwa apa yang tertulis memang benar-benar mencerminkan

pengalaman mereka sendiri. Jika partisipan menyatakan bahwa transkrip atau hasil penilaian tersebut sesuai dengan apa yang mereka alami, maka data dianggap kredibel. Artinya, temuan penelitian bukan sekadar interpretasi peneliti, melainkan benar-benar berakar dari kenyataan yang disampaikan oleh partisipan. Dengan demikian, uji kredibilitas menjadi langkah penting untuk menjamin keabsahan data, khususnya dalam penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono (2024:365) bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

1. Perpanjangan pengamatan

Mengapa dengan perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data? Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. *Rapport is a relationship of mutualtrust and emotional affinity between two or more people* (Susan Stainback dalam buku Sugiyono 2024:365-366)

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai contoh melihat sekelompok masyarakat yang sedang olah raga pagi. Bagi orang awam olahraga adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik. Tetapi bagi peneliti kualitatif tentu akan lain kesimpulannya. Setelah peneliti mencermati secara mendalam, olahraga pagi itu bagi sekelompok masyarakat itu merupakan wahana untuk transaksi bisnis. Selanjutnya untuk dapat memahami proses perdagangan narkoba, maka peneliti harus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan memahami bahasa-bahasa sandi mereka. Mengapa dengan meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data? Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/tidak. (Sugiyono 2024:367-368)

3. Triangulasi

Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures (William Wiersma, 1986). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Sugiyono 2024:368-371)

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerja sama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa di rata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan

observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Mengapa dengan analisis kasus negatif akan dapat meningkatkan kredibilitas data? Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang

ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut. Sebagai contoh, bila ada 99% orang mengatakan bahwa si A, pengedar narkoba, sedangkan 1% menyatakan tidak (negatif). Dengan adanya kasus negatif ini, maka peneliti justru harus mencari tahu secara mendalam mengapa masih ada data yang berbeda. Peneliti harus menemukan kepastian apakah 1% kelompok yang menyatakan si A bukan pengedar narkoba itu betul atau tidak. Kalau akhirnya yang 1% kelompok menyatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasus negatifnya tidak ada lagi. Dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel. (Sugiyono 2024:370)

5. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, *handycam*, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. (Sugiyono 2024:370-371)

6. Mengadakan Member check

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. (Sugiyono 2024:371)

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2022. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus*. Amuntai.
- Abdal. 2025. *Kebijakan Pulik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jawa Barat: Widina Media Utama.
- Afrian, Reno. 2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media
- Ahmad, dkk. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Pulishing Indonesia.
- Amir Salipu, dkk. 2023. *Pengantar Perumahan dan Permukiman Tinjauan Tentang Standar dan Aturan Dalam Perencanaan Pembangunan Permukiman Modern dan Tradisional*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Arifuddin, Q. 2025. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Pulishing Indonesia.
- Dani Nur Saputra, dkk. 2022. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Feriansyah Adi Saputra, dkk. 2024. *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kasemen Kota Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Mirdhani, R., Kusuma, A. R., & Irawan, B. 2025. *Implementasi Kebijakan Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Nelayan di Indonesia*. CV. Adanu Abimata.
- Muhammad Buchori Ibrahim, dkk. 2023. *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nisa, Khairun. 2022. *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai: tidak diterbitkan.
- Seta A Wicaksana, dkk. 2021. *Industri dan Organisasi Pendekatan Integratif dalam Menghadapi Perubahan*. Riau: DD Publishing.

- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syamsiah Badruddin, Paisal Halim dan Hikmat Gazaly. 2024. *Dasar-Dasar Statistik Sosial: Teori dan Praktik serta Petunjuk Praktis Pengolahan Data Sosial dengan SPSS*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Syarkawi, dkk. 2025. *Pengantar Kebijakan Publik*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Wahyudi, H. 2025. *Dasar-Dasar Teori Administrasi Negara*. Yogyakarta: Madani Kreatif Publisher.
- Yadi, A. S. 2021. *Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.